

ABSTRACT

This research aims to develop a structured and adaptable digitalization model for traditional markets (*pasar rakyat*) in Indonesia, addressing the multifaceted challenges faced by local governments in implementing digital transformation initiatives. These challenges include the lack of IT capacity within the Trade Offices, which are typically assigned responsibility for implementation despite their limited technological expertise, and the low level of digital literacy among traders, which hinders adoption. Using a mixed method, the study collected data from interviews, document reviews, and field observations across three administrative regions in the Special Region of Yogyakarta (DIY), selected for their active participation in early digitalization efforts.

The research process involves four stages: identifying existing conditions, designing the digitalization model, validating the model with expert judgement, and formulating implementation strategies. The findings reveal that while several digital components such as e-retribution, online marketplaces, and learning management systems have been locally implemented, the absence of national standards, limited resources, and fragmented governance remain substantial barriers. The final output of the study is a holistic digitalization model comprising strategic direction, service domains, implementation phases (adoption–transformation–harmonization), infrastructure requirements, and IT governance, aligned with Smart City and SPBE (Electronic-Based Government System) policies. This model provides a comprehensive reference for local governments to plan, implement, and scale sustainable digital market services.

Keywords: traditional market, IT governance & management, local government, digitalization model

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model digitalisasi pasar rakyat yang terstruktur dan adaptif, sebagai solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan transformasi digital. Permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup belum tersedianya kapasitas teknologi informasi di lingkungan Dinas Perdagangan yang menjadi pelaksana program, serta rendahnya literasi digital pedagang yang menyebabkan rendahnya tingkat adopsi teknologi. Melalui pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif), penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan di tiga kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memulai inisiatif digitalisasi pasar.

Proses penelitian mencakup empat tahapan: analisis kondisi eksisting, perancangan model digitalisasi, validasi model oleh pakar, dan penyusunan strategi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa bentuk digitalisasi seperti e-retribusi, katalog digital, dan sistem pembelajaran daring telah diterapkan di daerah, pelaksanaan digitalisasi masih menghadapi kendala serius seperti belum adanya standar nasional, keterbatasan infrastruktur dan SDM, serta lemahnya tata kelola lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan model digitalisasi pasar rakyat yang komprehensif dan kontekstual, yang terdiri dari arah strategis, cakupan layanan, tahapan implementasi (adopsi–transformasi–harmonisasi), kebutuhan infrastruktur dan tata kelola TI, serta keterkaitan dengan kebijakan *Smart City* dan SPBE. Model ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang dan menjalankan digitalisasi layanan pasar rakyat secara berkelanjutan.

Kata kunci: pasar rakyat, tata kelola dan manajemen TI, pemerintah daerah, model digitalisasi